



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 04 Februari 2020

Halaman: 2

PONDOKAN TAK BERIZIN PASANG TARIF HARIAN Kecamatan Umbulharjo Turun Tangan

UMBULHARJO (MERAPI) - Penginapan tak berizin muncul di wilayah Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Bangunan itu sudah digunakan sebagai penginapan harian, walaupun belum mengantongi izin. Kecamatan Umbulharjo baru memberikan peringatan agar pengelola mengurus izin.

Camat Umbulharjo Rumpis Trimintarta mengakui adanya kos-kosan atau pondokan eksklusif di wilayahnya. Ada satu bangunan yang semula diduga sebagai kos-kosan eksklusif yang menerapkan tarif harian. Namun saat dicek, pengelola bangunan dengan jumlah 10 kamar lebih itu tidak bisa menunjukkan izin.

"Ada satu yang mengarah ke situ. Saat dicek di lokasi bersa-

ma Satpol PP, ternyata pengelola belum ada izinnya sama sekali. Pengelola belum bisa menunjukkan izin. Padahal sudah dipakai penginapan harian," kata Rumpis, Senin (3/2).

Dia menyampaikan kecamatan bersama Satpol PP sudah memberikan peringatan kepada pengelola penginapan ilegal itu. Pengelola penginapan juga diminta mengurus izin. Menurutnya dengan konsep pengi-

napan tarif harian, maka arah izinnya bukan pondokan karena pondokan tarif minimal 30 hari atau bulanan.

"Kami berikan pembinaan dan peringatan. Kalau tidak segera memenuhi izin kami sampaikan ke PPNS Satpol PP untuk diproses yustisi tindak pidana ringan," tegasnya.

Dia menyatakan dalam pengawasan pondokan kecamatan juga bekerja sama dengan Kampung Panca Tertib karena kelurahan wilayah Umbulharjo dan keterbatasan personel. Terkait potensi pelanggaran fungsi pondokan jadi hotel di tengah maraknya operator hotel virtual, pihaknya mengaku belum ada pondokan yang mengarah

ke itu.

"Kalau ada pondokan yang sudah berizin tapi disalahgunakan fungsinya, kami akan lakukan pembinaan dan peringatan. Jika sampai surat peringatan ketiga tetap melanggar kami cabut izinnnya," papar Rumpis.

Secara terpisah Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Agus Winarto membenarkan kecamatan sebagai pihak yang mengeluarkan izin pondokan juga berwenang melakukan pengawasan. Hal itu mengacu Perda Nomor 1 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan. Oleh sebab itu Satpol PP bekerja sama dengan wilayah melalui Satpol PP yang selama ini ditugaskan

di kecamatan-kecamatan.

"Kemarin baru satu (dugaan pondokan eksklusif) yang coba diklarifikasi. Tapi yang bersangkutan belum bisa menunjukkan izin. Sudah dipanggil Satpol PP yang ditugaskan di Kecamatan Umbulharjo. Belum kami tipir-ing karena kami mau pastikan mengantongi izin atau tidak. Kalau belum ada izin kami akan tutup dulu," terang Agus.

Pihaknya menegaskan akan mengecek semua fungsi-fungsi properti dengan maraknya manajemen hotel virtual. Semua properti, lanjutnya, harus sesuai perizinan peruntukannya. Misalnya pondokan tidak boleh untuk penginapan harian.

(Tri)-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Umbulharjo 2. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005